

**PENJELASAN KERTAS KERJA EVALUASI
DALAM RANGKA PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
INDIKATOR HASIL			
1	Nilai Indeks Integritas	INDEX	Cukup jelas
2	Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik	INDEX	Cukup jelas
3	Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan	%	Nilai kerugian negara yang telah diselesaikan dibagi dengan nilai kerugian negara yang ditemukan
4	Persentase temuan <i>in-efektif</i>	%	Nilai temuan <i>in efektif</i> dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
5	Persentase temuan <i>in-efisien</i>	%	Nilai temuan <i>in efisien</i> dibagi dengan jumlah anggaran unit kerja
6	Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	%	Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
7	Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan	%	Jumlah pengaduan masyarakat yang belum diselesaikan dibagi dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke unit kerja
8	Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN	%	Jumlah pegawai yang dijatuhi hukuman karena KKN dibagi dengan jumlah seluruh pegawai yang ada di dalam unit kerja
INDIKATOR PROSES			
1	Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas		
a	Pemenuhan		
1)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	y/t	Cukup jelas
2)	Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi pada PerMenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011	y/t	Cukup jelas
3)	Telah membentuk Forum Pemantau Independen	y/t	Cukup jelas
4)	Telah ada Kode Etik Pemantau Independen	y/t	Cukup jelas
b	Kualitas		
5)	Jumlah pegawai yang telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas	a/b/c/d/e	a, apabila seluruh pegawai pada unit kerja telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas b, apabila jumlah pegawai pada unit kerja <100% sampai dengan 61% telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas; c, apabila jumlah pegawai pada unit kerja ≤ 60% sampai dengan 41% telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas; d apabila jumlah pegawai pada unit kerja ≤40% sampai dengan 11% telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas; e, apabila jumlah pegawai pada unit kerja ≤10% telah melakukan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.
6)	Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu pada saat pelantikan jabatan	y/t	Cukup jelas
7)	Substansi kode etik Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan substansi pada PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011	a/b/c	a, apabila tingkat kesesuaian substansi kode etik Forum Pemantau Independen antara 50% hingga 100% b, apabila tingkat kesesuaian substansi kode etik Forum Pemantau Independen antara 10% hingga 49%; c, apabila tingkat kesesuaian substansi kode etik Forum Pemantau Independen <10%.
8)	Keanggotaan Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011	y/t	Cukup jelas
c	Implementasi		
9)	Unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan substansi Pakta Integritas secara berkala	y/t	Cukup jelas
10)	Unit kerja telah mengalokasikan dana anti korupsi dalam DIPA	y/t	Cukup jelas
11)	Jumlah pegawai pada unit kerja yang melanggar substansi Pakta Integritas	a/b/c/d/e	a, apabila tidak ada pegawai pada unit kerja yang melanggar substansi Pakta Integritas b, apabila jumlah pegawai yang melanggar substansi Pakta Integritas ≤10%; c, apabila jumlah pegawai yang melanggar substansi Pakta Integritas >10% sampai dengan 40%; d, apabila jumlah pegawai yang melanggar substansi Pakta Integritas >40% sampai dengan 60%; e, apabila jumlah pegawai yang melanggar substansi Pakta Integritas >60% sampai dengan 100%.
12)	Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan Forum Pemantau Independen dalam hal pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pakta Integritas	y/t	Cukup jelas
2	Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara		
a	Pemenuhan		
1)	Pegawai yang wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK	y/t	cukup jelas
2)	Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib lapor LHKPN bagi pejabat yang memegang jabatan strategis dan potensial/rawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan instansi	y/t	cukup jelas
3)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan LHKPN	y/t	cukup jelas

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
	b Kualitas		
4)	LHKPN telah disampaikan tepat waktu	a/b/c	a, apabila tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN antara 50% hingga 100% b, apabila tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN antara 10% hingga 49%; c, apabila tingkat ketepatan waktu penyampaian LHKPN <10%.
5)	Kesesuaian LHKPN dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan	a/b/c	a, apabila tingkat kesesuaian format LHKPN antara 50% hingga 100% b, apabila tingkat kesesuaian format LHKPN antara 10% hingga 49%; c, apabila tingkat kesesuaian format LHKPN <10%.
	c Implementasi		
6)	Jumlah pegawai pada unit kerja yang mempunyai harta kekayaan yang tidak wajar	a/b/c/d/e	a, apabila tidak ada pegawai pada unit kerja yang mempunyai harta kekayaan yang tidak wajar b, apabila jumlah pegawai yang mempunyai harta kekayaan yang tidak wajar ≤10%; c, apabila jumlah pegawai yang mempunyai harta kekayaan yang tidak wajar >10% sampai dengan 40%; d, apabila jumlah pegawai yang mempunyai harta kekayaan yang tidak wajar >40% sampai dengan 60%; e, apabila jumlah pegawai yang mempunyai harta kekayaan yang tidak wajar >60% sampai dengan 100%.
7)	Kepatuhan pejabat/pegawai menyampaikan LHKPN	a/b/c/d/e	a, apabila seluruh pegawai telah melaporkan LHKPN sesuai format dan tepat waktu b, apabila jumlah pegawai telah melaporkan LHKPN sesuai format dan tepat waktu ≥90% sampai dengan <100%; c, apabila jumlah pegawai telah melaporkan LHKPN sesuai format dan tepat waktu ≥60% sampai dengan <90%; d, apabila jumlah pegawai telah melaporkan LHKPN sesuai format dan tepat waktu ≥40% sampai dengan <60%; e, apabila jumlah pegawai telah melaporkan LHKPN sesuai format dan tepat waktu 0% sampai dengan <40%;
8)	Tingkat kesesuaian LHKPN dengan harta kekayaan pegawai	a/b/c	a, apabila tingkat kesesuaian format LHKPN antara 50% hingga 100% b, apabila tingkat kesesuaian format LHKPN antara 10% hingga 49%; c, apabila tingkat kesesuaian format LHKPN <10%.
9)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pemenuhan LHKPN	y/t	cukup jelas
3	Akuntabilitas Kinerja		
	a Pemenuhan		
1)	Telah ada Renstra	y/t	cukup jelas
2)	Telah ada RKT	y/t	cukup jelas
3)	Telah ada Indikator Kinerja Utama	y/t	cukup jelas
4)	LAKIP telah disusun tepat waktu	y/t	cukup jelas
	b Kualitas		
5)	Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil	a/b/c/d/e	a, apabila ≥80% indikator tujuan dan sasaran dalam RPJM telah memenuhi kriteria SMART; b, apabila 60% ≤ Indikator SMART < 80%; c, apabila 40% ≤ Indikator SMART < 60%; d, apabila 20% ≤ Indikator SMART < 40% e, apabila indikator yang SMART < 20%
6)	Tujuan/Sasaran selaras	a/b/c/d/e	a, apabila ≥80% tujuan dan sasaran yg ditetapkan telah selaras; b, apabila 60% ≤ tujuan dan sasaran selaras < 80%; c, apabila 40% ≤ tujuan dan sasaran selaras < 60%; d, apabila 20% ≤ tujuan dan sasaran selaras < 40% e, apabila tujuan dan sasaran selaras < 20%
7)	Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a/b/c/d/e	a, apabila ≥80% target yg ditetapkan ber kriteria baik; b, apabila 60% ≤ Target yg baik < 80%; c, apabila 40% ≤ Target yg baik < 60%; d, apabila 20% ≤ Target yg baik < 40% e, apabila Target yg baik < 20%
8)	Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik	a/b/c/d/e	Target yg baik: - Selaras dengan RPJM/RPJM; - Berdasarkan indikator yg SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai
	c Implementasi		
9)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan	a/b/c/d/e	Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan secara nyata untuk perbaikan perencanaan, dengan memperhatikan: Nilai a, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan sangat baik. Nilai b, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan baik. Nilai c, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan cukup. Nilai d apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan kurang. Nilai e apabila sama sekali tidak dimanfaatkan.
10)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	a/b/c/d/e	Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan secara nyata untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja secara keseluruhan, dengan memperhatikan: Nilai a, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan sangat baik. Nilai b, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan baik. Nilai c, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan cukup. Nilai d apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan kurang. Nilai e apabila sama sekali tidak dimanfaatkan.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
11)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja	a/b/c/d/e	Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan secara nyata untuk perbaikan capaian kinerja organisasi, dengan memperhatikan: Nilai a, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan sangat baik. Nilai b, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan baik. Nilai c, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan cukup. Nilai d apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan kurang. Nilai e apabila sama sekali tidak dimanfaatkan.
12)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja	a/b/c/d/e	Penilaian a/b/c/d/e didasarkan pada tingkat kualitas pemanfaatan secara nyata untuk perbaikan capaian kinerja organisasi, dengan memperhatikan: Nilai a, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan sangat baik (untuk dasar penilaian dan ada reward und punishment yang baik). Nilai b, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan baik (untuk dasar penilaian dan ada sudah reward und punishment yang cukup). Nilai c, apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan cukup (untuk dasar penilaian dan ada sudah reward und punishment walaupun masih sedikit). Nilai d apabila telah dimanfaatkan dengan tingkat kualitas pemanfaatan kurang (untuk dasar penilaian dan belum ada reward und punishment yang cukup). Nilai e apabila sama sekali tidak dimanfaatkan.
4	Kewajiban Laporan Keuangan		
a	Pemenuhan		
1)	Laporan Keuangan telah ada	y/t	cukup jelas
b	Kualitas		
2)	Unit kerja telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	a/b/c	a, apabila tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan antara 50% hingga 100% b, apabila tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan antara 10% hingga 49%; c, apabila tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan <10%.
3)	Kesesuaian Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan (SAP)	a/b/c/d/e	a, apabila Laporan Keuangan telah sesuai dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan ≥ 80% ; b, apabila kesesuaian format laporan antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila kesesuaian format laporan antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila kesesuaian format laporan antara 20% sampai dengan <40% e, apabila tingkat kesesuaian < 20%
c	Implementasi		
4)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan	a/b/c/d/e	a, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan ≥80%; b, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan antara 20% sampai dengan <40% e, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan < 20%
5)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan	a/b/c/d/e	a, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan ≥80%; b, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan antara 20% sampai dengan <40% e, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan antara < 20%
6)	Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya	a/b/c/d/e	a, apabila Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya ≥80%; b, apabila Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya antara 40% < sampai dengan < 60%; d, apabila Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya antara 20% sampai dengan <40% e, apabila Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya < 20%
7)	Hasil audit atas Laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan	a/b/c/d/e	a, apabila hasil audit atas laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan ≥80%; b, apabila hasil audit atas laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan 60% sampai dengan < 80%; c, apabila hasil audit atas laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan 40% sampai dengan < 60%; d, apabila hasil audit atas laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan 20% sampai dengan <40% e, apabila hasil audit atas laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan < 20%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
5	Kebijakan Disiplin PNS *)		
a	Pemenuhan		
1)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
b	Kualitas		
2)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
c	Implementasi		
3)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
6	Kode Etik Khusus		
a	Pemenuhan		
1)	Kode etik instansi telah dibuat/diterbitkan	y/t	cukup jelas
2)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kode etik	y/t	cukup jelas
b	Kualitas		
3)	Materi Kode etik instansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	a/b/c/d/e	a, apabila materi kode etik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi $\geq 80\%$; b, apabila materi kode etik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara 60% sampai dengan <80%; c, apabila materi kode etik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila materi kode etik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara 20% sampai dengan <40% e, apabila materi kode etik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi < 20%
4)	Materi Kode Etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a/b/c/d/e	a, apabila materi kode etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku $\geq 80\%$; b, apabila materi kode etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila materi kode etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila materi kode etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara 20% sampai dengan <40% e, apabila kesesuaian materi kode etik < 20%
5)	Kode etik telah memuat kriteria etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri dan terhadap sesama PNS	a/b/c/d/e	a, apabila $\geq 80\%$ materi kode etik telah memuat kriteria tersebut; b, apabila 60% sampai dengan < 80%; c, apabila 40% sampai dengan < 60%; d, apabila 20% sampai dengan <40% e, apabila telah memuat kriteria < 20%
6)	Kode etik telah memuat ketentuan tentang sanksi dan pembentukan majelis kode etik dalam rangka penegakan kode etik	a/b/c/d/e	a, apabila $\geq 80\%$ materi kode etik telah memuat ketentuan tersebut; b, apabila 60% sampai dengan < 80%; c, apabila 40% sampai dengan < 60%; d, apabila 20% sampai dengan <40% e, apabila telah memuat ketentuan < 20%
7)	Materi Kode etik instansi telah sesuai dengan karakteristik dan masalah yang dihadapi oleh instansi sehari-hari	a/b/c/d/e	a, apabila materi kode etik telah sesuai dengan karakteristik instansi $\geq 80\%$; b, apabila materi kode etik telah sesuai dengan karakteristik instansi antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila materi kode etik telah sesuai dengan karakteristik instansi antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila materi kode etik telah sesuai dengan karakteristik instansi antara 20% sampai dengan <40% e, apabila telah sesuai dengan karakteristik instansi < 20%
8)	Materi Kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif	a/b/c/d/e	a, apabila materi kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif $\geq 80\%$; b, apabila materi kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila materi kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila materi kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif antara 20% sampai dengan <40% e, apabila telah kode etik telah menyertakan SOP aplikatif < 20%
c	Implementasi		
9)	Jumlah pegawai melakukan pelanggaran kode etik	a/b/c	a, apabila tingkat pelanggaran kode etik antara 50% hingga 100% b, apabila tingkat pelanggaran kode etik antara 10% hingga 49%; c, apabila tingkat pelanggaran kode etik <10%.
10)	Kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	a/b/c/d/e	a, apabila kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai $\geq 80\%$; b, apabila kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai antara 40%< sampai dengan < 60%; d, apabila kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai antara 20%< sampai dengan <40% e, apabila kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai < 20%
11)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik	a/b/c/d/e	a, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik $\geq 80\%$; b, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik antara 20% sampai dengan <40% e, apabila pengendalian atas penerapan kode etik < 20%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
12)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik	a/b/c/d/e	a, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik $\geq 80\%$; b, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik antara 20% sampai dengan <40% e. apabila pengendalian atas penerapan kode etik < 20%
13)	Unit kerja telah memiliki kode etik khusus yang berlaku di dalam unit kerja atas hasil penerapan kode etik instansi	y/t	cukup jelas
14)	Pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi	y/t	cukup jelas
15)	Penjatuhan sanksi telah dilaksanakan sesuai dengan SOP	a/b/c/d/e	a, apabila unit kerja telah melakukan penjatuhan sanksi sesuai dengan SOP lebih dari 80% ; b, apabila unit kerja telah melakukan penjatuhan sanksi sesuai dengan SOP antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila unit kerja telah melakukan penjatuhan sanksi sesuai dengan SOP antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila unit kerja telah melakukan penjatuhan sanksi sesuai dengan SOP antara 20% sampai dengan <40% e, apabila tindakan penjatuhan sanksi sesuai dengan SOP < 20%
7	Kebijakan Pelayanan Publik *)		
a	Pemenuhan		
1)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
b	Kualitas		
2)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
c	Implementasi		
3)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
8	Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi		
a	Pemenuhan		
1)	Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi	y/t	Cukup jelas
2)	Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola WBS di lingkungan instansi	y/t	cukup jelas
3)	WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	Cukup jelas
b	Kualitas		
4)	Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a/b/c/d/e	a, apabila Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku $\geq 80\%$; b, apabila Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara 20% sampai dengan <40% e, apabila kesesuaian < 20%
5)	Telah ada unit kerja khusus yang menangani WBS	y/t	Cukup jelas
6)	WBS telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban	y/t	Cukup jelas
7)	WBS telah menggunakan teknologi informasi yang tepat guna	y/t	Cukup jelas
c	Implementasi		
8)	Unit kerja telah melaksanakan WBS	y/t	Cukup jelas
9)	Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan	y/t	Cukup jelas
10)	Telah disediakan fasilitas yang mempermudah pegawai untuk menyampaikan pengaduan	y/t	Cukup jelas
11)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS	a/b/c/d/e	a, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS $\geq 80\%$; b, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS antara 20% sampai dengan <40% e. apabila pengendalian pelaksanaan WBS < 20%
12)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS	a/b/c/d/e	a, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS $\geq 80\%$; b, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS antara 20% sampai dengan <40% e. apabila tindakan atas pengendalian pelaksanaan WBS < 20%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
9	Program Pengendalian Gratifikasi		
a	Pemenuhan		
1)	Instansi telah menyusun Program Pengendalian Gratifikasi	y/t	Cukup Jelas
2)	Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola gratifikasi di lingkungan instansi	y/t	cukup jelas
3)	Instansi telah membentuk pengelola pengendalian gratifikasi	y/t	cukup jelas
4)	Program Pengendalian Gratifikasi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	Cukup Jelas
b	Kualitas		
5)	Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan baik	y/t	Cukup Jelas
6)	Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	y/t	Cukup Jelas
c	Implementasi		
7)	Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi	y/t	Cukup Jelas
8)	Pegawai telah melaporkan kepada KPK terhadap pemberian hadiah/hibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai gratifikasi	y/t	Cukup Jelas
9)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi	a/b/c/d/e	a, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi $\geq 80\%$; b, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila pelaksanaan pengendalian atas program < 20%
10)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi	a/b/c/d/e	a, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi $\geq 80\%$; b, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 20%
10	Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)		
a	Pemenuhan		
1)	Telah ada Pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi	y/t	Cukup Jelas
2)	Pedoman telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	Cukup Jelas
b	Kualitas		
3)	Materi kebijakan penanganan benturan kepentingan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	y/t	Cukup Jelas
4)	Pedoman telah mencakup seluruh elemen strategis yang berada di lingkungan instansi	y/t	Cukup Jelas
5)	Pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan konflik kepentingan	a/b/c/d/e	a, apabila pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan konflik kepentingan $\geq 80\%$; b, apabila pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan konflik kepentingan antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan konflik kepentingan antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan konflik kepentingan antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan konflik kepentingan < 20%
c	Implementasi		
6)	Unit kerja telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan	y/t	Cukup Jelas
7)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	a/b/c/d/e	a, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan $\geq 80\%$; b, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila pelaksanaan pengendalian atas program < 20%
8)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	a/b/c/d/e	a, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan $\geq 80\%$; b, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila pelaksanaan tindakan-tindakan yang diperlukan < 20%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
11	Promosi dan Pendidikan/Pembinaan Anti Korupsi		
a	Pemenuhan		
1)	Unit kerja telah menyusun Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan Anti Korupsi	y/t	Cukup Jelas
2)	Telah ada alokasi dana dalam DIPA tentang Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi	y/t	Cukup Jelas
3)	Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	Cukup Jelas
b	Kualitas		
4)	Kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik	y/t	Cukup Jelas
5)	Materi Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	y/t	Cukup Jelas
c	Implementasi		
6)	Unit kerja telah melaksanakan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi	y/t	Cukup Jelas
7)	Telah ada kegiatan promosi anti korupsi internal	y/t	Cukup Jelas
8)	Telah ada kegiatan promosi anti korupsi eksternal	y/t	Cukup Jelas
9)	Kegiatan promosi anti korupsi dilaksanakan dalam momen yang tepat	a/b/c/	a, apabila tingkat ketepatan momen dalam pelaksanaan kegiatan anti korupsi antara 50% hingga 100% b, apabila tingkat ketepatan momen dalam pelaksanaan kegiatan anti korupsi antara 10% hingga 49%; c, apabila tingkat ketepatan momen dalam pelaksanaan kegiatan anti korupsi <10%.
10)	Telah ada kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai	y/t	Cukup Jelas
11)	kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai dilakukan secara berkala dan kontinu	y/t	a, apabila kegiatan pelaksanaan kegiatan anti korupsi dilakukan secara berkala dan kontinu antara 50% hingga 100% b, apabila kegiatan pelaksanaan kegiatan anti korupsi dilakukan secara berkala dan kontinu antara 10% hingga 49%; c, apabila kegiatan pelaksanaan kegiatan anti korupsi dilakukan secara berkala dan kontinu <10%.
12)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi	a/b/c/d/e	a, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi ≥80%; b, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi antara 20% sampai dengan <40% e, apabila pelaksanaan pengendalian atas Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi < 20%
13)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi	a/b/c/d/e	a, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi ≥80%; b, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi 60% sampai dengan < 80%; c, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi 40% sampai dengan < 60%; d, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi 20% sampai dengan <40% e, apabila telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi < 20%
12	Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP		
a	Pemenuhan		
1)	BPK/KPK/APIP telah memberikan saran perbaikan kepada unit kerja	y/t	Cukup Jelas
2)	Telah ada komitmen pimpinan untuk melaksanakan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP	y/t	Cukup Jelas
3)	Unit kerja telah melaksanakan saran perbaikan	y/t	Cukup Jelas
b	Kualitas		
4)	Pelaksanaan saran perbaikan dilakukan tepat waktu	a/b/c/	a, apabila tingkat ketepatan waktu tingkat pelaksanaan perbaikan antara 50% hingga 100% b, apabila tingkat ketepatan waktu tingkat pelaksanaan perbaikan antara 10% hingga 49%; c, apabila tingkat ketepatan waktu tingkat pelaksanaan perbaikan <10%.
5)	Unit kerja telah membuat laporan tentang pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan	y/t	Cukup Jelas
c	Implementasi		
6)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan	a/b/c/d/e	a, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan ≥80%; b, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan antara 60% sampai dengan 80%; c, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan antara 40% sampai dengan 60%; d, apabila telah melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan antara 20% sampai dengan <40% e, apabila pelaksanaan pelaksanaan pengendalian yang diperlukan < 20%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
7)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas saran perbaikan	a/b/c/d/e	a, apabila $\geq 80\%$ telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan; b, apabila $60\% <$ telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan $< 80\%$; c, apabila $40\% <$ telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan $< 60\%$; d, apabila $20\% <$ telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan $< 40\%$ e, telah melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan $< 20\%$
8)	Saran perbaikan telah digunakan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan	y/t	Cukup Jelas
9)	Hasil pelaksanaan atas saran perbaikan telah digunakan sebagai peningkatan mutu atas kinerja dari unit kerja	y/t	Cukup Jelas
13	Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (Post Employment Policy *)		
a	Pemenuhan		
1)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
b	Kualitas		
2)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
c	Implementasi		
3)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
14	Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK		
a	Pemenuhan		
1)	Unit Kerja telah melakukan kerjasama dalam pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar dengan PPATK	y/t	Cukup Jelas
2)	Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk mengawasi transaksi keuangan yang tidak wajar pegawainya	y/t	Cukup Jelas
3)	Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	Cukup Jelas
b	Kualitas		
4)	Kerjasama dengan PPATK telah dituangkan dalam bentuk MoU	y/t	Cukup Jelas
5)	Unit kerja telah meminta laporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK secara berkala	y/t	Cukup Jelas
c	Implementasi		
6)	Unit kerja telah melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan PPATK	y/t	Cukup Jelas
7)	Unit kerja telah melakukan kerjasama dalam meminta laporan keuangan kepada PPATK dalam rangka promosi/mutasi jabatan pegawai	y/t	Cukup Jelas
8)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK	a/b/c/d/e	a, apabila telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK $\geq 80\%$; b, apabila telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK antara 60% sampai dengan $< 80\%$; c, apabila telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK antara 40% sampai dengan $< 60\%$; d, apabila telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK antara 20% sampai dengan $< 40\%$ e, apabila pelaksanaan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan $< 20\%$
9)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK	a/b/c/d/e	a, apabila telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK $\geq 80\%$; b, apabila telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK antara 60% sampai dengan $< 80\%$; c, apabila telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK antara 40% sampai dengan $< 60\%$; d, apabila telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK antara 20% sampai dengan $< 40\%$ e, apabila telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK $< 20\%$
10)	Pegawai yang terbukti melakukan transaksi keuangan secara tidak wajar telah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin PNS	y/t	Cukup Jelas
15	Promosi Jabatan secara terbuka *)		
a	Pemenuhan		
1)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
b	Kualitas		
2)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
c	Implementasi		
3)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
16	Rekrutmen secara terbuka		
a	Pemenuhan		
1)	Unit kerja telah melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka	y/t	Cukup jelas
2)	Unit kerja telah menyusun mekanisme dan pola rekrutmen pegawai secara terbuka	y/t	Cukup jelas
3)	Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka	y/t	Cukup jelas
4)	Unit kerja telah mensosialisasikan mekanisme rekrutmen secara terbuka kepada pegawai	y/t	Cukup jelas
5)	Unit kerja telah membentuk tim pelaksanaan rekrutmen pegawai yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan	y/t	Cukup jelas
b	Kualitas		
6)	Pelaksanaan rekrutmen telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	y/t	Cukup jelas
7)	Rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh unit kerja	a/b/c/d/e	a, apabila rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh unit kerja $\geq 80\%$; b, apabila rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh unit kerja antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh unit kerja antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh unit kerja antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh unit kerja < 20%
8)	Pelaksanaan rekrutmen telah dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan	y/t	Cukup jelas
c	Implementasi		
9)	Hasil rekrutmen telah dipublikasikan kepada masyarakat	y/t	Cukup jelas
10)	Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat independen dan berintegritas	a/b/c/d/e	a, apabila Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat independen dan berintegritas $\geq 80\%$; b, apabila Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat independen dan berintegritas antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat independen dan berintegritas antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat independen dan berintegritas antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat independen dan berintegritas < 20%
17	Mekanisme Pengaduan Masyarakat		
a	Pemenuhan		
1)	Telah ada pedoman internal penanganan pengaduan masyarakat	y/t	Cukup jelas
2)	Mekanisme pengaduan masyarakat telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	Cukup jelas
b	Kualitas		
3)	Pedoman penanganan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	y/t	Cukup jelas
4)	Telah dibentuk tim yang menangani pengaduan masyarakat	y/t	Cukup jelas
5)	Telah dibentuk sistem perlindungan terhadap saksi dan korban	y/t	Cukup jelas
c	Implementasi		
6)	Unit kerja telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat	a/b/c/d/e	a, apabila telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat $\geq 80\%$; b, apabila telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat < 20%
7)	Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku	a/b/c/d/e	a, apabila Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku $\geq 80\%$; b, apabila Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku < 20%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
	8) Kerahasiaan identitas pelapor telah ditangani dengan baik	y/t	Cukup jelas
	9) Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan	y/t	Cukup jelas
	10) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat	a/b/c/d/e	a, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat $\geq 80\%$; b, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat < 20%
	11) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat	a/b/c/d/e	a, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat $\geq 80\%$; b, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat < 20%
18	e-Procurement		
	a Pemenuhan		
	1) Telah ada pedoman penerapan e-Procurement	y/t	cukup jelas
	2) Telah ada unit khusus yang menangani e-procurement	y/t	cukup jelas
	3) Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk menerapkan e-procurement	y/t	cukup jelas
	4) e-Procurement telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	cukup jelas
	b Kualitas		
	5) e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	y/t	cukup jelas
	6) Pimpinan Instansi telah menetapkan melalui SK kan tentang wajib e-procurement untuk paket pekerjaan bernilai tertentu	y/t	cukup jelas
	7) e-procurement dilakukan dengan membentuk/ bekerja sama dengan LPSE	y/t	cukup jelas
	8) e-procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai ketentuan	y/t	cukup jelas
	c Implementasi		
	9) Unit kerja telah melaksanakan e-Procurement	y/t	cukup jelas
	10) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement	a/b/c/d/e	a, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement $\geq 80\%$; b, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement < 20%
	11) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement	a/b/c/d/e	a, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement $\geq 80\%$; b, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement antara 60% sampai dengan < 80%; c, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement antara 40% sampai dengan < 60%; d, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement antara 20% sampai dengan < 40% e, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement < 20%
19	Pengukuran Kinerja Individu		
	a Pemenuhan		
	1) xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
	b Kualitas		
	2) xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)
	c Implementasi		
	3) xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	xx (Belum dijadikan kriteria)

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	PENJELASAN
A	B	C	
20	Keterbukaan Informasi Publik		
a	Pemenuhan		
1)	Telah ada kebijakan tentang informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP	y/t	Cukup jelas
2)	Kebijakan tentang informasi publik telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	Cukup jelas
b	Kualitas		
3)	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	y/t	Cukup jelas
4)	Telah ada mekanisme penyampaian informasi publik	y/t	Cukup jelas
5)	Pimpinan instansi/unit kerja telah membentuk sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik	y/t	Cukup jelas
6)	Pimpinan instansi/unit kerja telah memanfaatkan media elektronik dalam pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi informasi publik	y/t	Cukup jelas
7)	Pimpinan Instansi/unit kerja telah melakukan penetapan klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik dan informasi yang dikecualikan	y/t	Cukup jelas
c	Implementasi		
8)	Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik	a/b/c/d/e	a, apabila Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik $\geq 80\%$; b, apabila Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik antara 60% sampai dengan $< 80\%$; c, apabila Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik antara 40% sampai dengan $< 60\%$; d, apabila Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik antara 20% sampai dengan $< 40\%$ e, apabila Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik $< 20\%$
9)	Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara berkala	a/b/c/d/e	a, apabila Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara berkala $\geq 80\%$; b, apabila Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara berkala antara 60% sampai dengan $< 80\%$; c, apabila Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara berkala antara 40% sampai dengan $< 60\%$; d, apabila Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara berkala antara 20% sampai dengan $< 40\%$ e, apabila Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara berkala $< 20\%$
10)	Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu	a/b/c/d/e	a, apabila Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu $\geq 80\%$; b, apabila Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu antara 60% sampai dengan $< 80\%$; c, apabila Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu antara 40% sampai dengan $< 60\%$; d, apabila Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu antara 20% sampai dengan $< 40\%$ e, apabila Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu secara berkala $< 20\%$
11)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik	a/b/c/d/e	a, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik $\geq 80\%$; b, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik antara 60% sampai dengan $< 80\%$; c, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik antara 40% sampai dengan $< 60\%$; d, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik antara 20% sampai dengan $< 40\%$ e, apabila Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik $< 20\%$
12)	Informasi publik telah dilakukan pengarsipan dan dokumentasi	y/t	Cukup jelas
13)	Pimpinan instansi/ unit kerja telah melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik	y/t	Cukup jelas
14)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik	a/b/c	a, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik $\geq 80\%$; b, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik antara 60% sampai dengan $< 80\%$; c, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik antara 40% sampai dengan $< 60\%$; d, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik antara 20% sampai dengan $< 40\%$ e, apabila Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik $< 20\%$